

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI BEREDARNYA MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, RISTI LILIS ANDINI (30301207851), Dr. Hj. AnisMashdurohatun, S.H., M.Hum

Perlindungan konsumen merupakan hal yang berkaitan dengan bidang bisnis terutama bidang penjualan makanan dan minuman. Tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat kurang waspadanya konsumen. Peredaran makanan dan minuman yang semakin beragam, membuat konsumen tidak memperhatikan label pada makanan dan minuman tersebut terutama pada label halal dan tanggal kadaluwarsa. Hal tersebut dapat memicu pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari berbagai lembaga seperti LPPOM MUI yang bertugas menangani sertifikasi halal, Badan POM bertugas mengawasi peredaran produk dan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam konsumen. sumber hukum berlandaskan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pokok dari permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan, kendala apa yang muncul serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan, apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis, penelitian terhadap norma-norma dan peraturan hukum yang terdapat dalam peraturan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian yaitu (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dari beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui berbagai tahap dan terkait dengan banyak sektor. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama yang baik. Proses pelaksanaan mulai dari sertifikasi Halal, pelabel dan pengawasan secara langsung ke beberapa toko dan swalayana oleh Badan POM serta Penyelesaian sengketa Konsumen oleh BPSK. (2) Kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dari beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terletak pada banyaknya produk baru yang bervariasi, dokumen yang kurang lengkap, luasnya wilayah, dan banyaknya toko maupun swalayan di beberapa daerah serta minimnya pihak yang dapat turun langsung, sehingga sulit untuk dijangkau dan diawasi. (3) Perlindungan hukum yang ideal terhadap konsumen dari beredarnya makanan dan minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan pengawasan dan pemeriksaan langsung, konsumen harus teliti dan cermat sebelum membeli produk, serta produsen harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari konsumen dan juga harus menggunakan bahan baku yang aman dan tidak berbahaya. Ketentuan pasal 7 UUPK huruf d bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku. Walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya, tetap saja masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan menjual makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa. Penulis memberikan saran terhadap peran pemerintah dan lembaga yang berwenang dalam perlindungan konsumen harus lebih mengawasi pelaku usaha dan meninjau kembali peraturan tentang perlindungan konsumen serta mempertegas hukuman untuk pelaku usahaterebut, agar tidak ada konsumen yang dirugikan lagi.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Konsumen Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa, Perlindungan Konsumen.

DaftarPustaka:25(1945-2015)

ABSTRACT
**LEGAL PROTECTION TO CONSUMERS FROM THE CIRCULATION OF FOOD AND
DRINK EXPIRY VIEWED ON LAW NO. 8th OF 1999 ABOUT CONSUMERS
PROTECTION, RISTI LILIS ANDINI (30301207851), Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.
Hum**

Protection of consumers related to the field of business, especially the sale of food and beverages. Not a few consumers who suffered losses due to lack of wary. Circulation of food and drinks are increasingly diverse, making consumers do not pay attention to the labels on food and beverages, especially in the halal labels and expiry dates. That could spur businessmen to cheat. It is therefore, necessary of legal protection to consumers from various institutions such as LPPOM MUI in charge handle of halal certification, BPOM oversees circulation of products and BPSK handle of consumer dispute resolution institutions. The source of law grounded on Law No. 8th of 1999 about consumer protection. Principal of this issue is how the implementation, the constraints of what appears and solutions in the legal protection to consumers of circulation of food and drink expiry viewed on law No. 8th of 1999 about consumers protection. The aim of research to find out the implementation process, what are the constraints and solutions in the legal protection to the consumer viewed on law No. 8th of 1999 about consumers protection. The method used is the method of sociological, research on the norms and rules of law contained in the regulation of consumer protection. Results of the study are (1) The legal protection of the consumer from the circulation of food and drink expiry viewed on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection through various stages and related to many sectors. For that be needeed guarantee to encourage good cooperation. The implementation process starting from Halal certification, Labeling and control directly to several shops and swalyana BPOM and a settlement of Consumer disputes by BPSK. (2) Challenges to the legal protection to consumer from the circulation of food and drink expiry viewed on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection lies in the number of new products are varied, incomplete document, wide area, and many shops and supermarkets in some areas and the lack of supervisor, so it was difficult to supervised. (3) The legal protection that is ideal to consumers of the circulation of food and drink expiry viewed on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection with direct supervision and examination, the consumer must be carefully and thoroughly before buying the product, and manufacturer must attention to the safety and comfort of the consumers and also have to use raw materials that are safe and harmless. The provisions of article 7 of UUPK letter d, that the obligation of the manufacturer is to ensure the quality of goods and / or services produced and / or traded under the provisions of the standard of quality of goods and / or services are applicable. Although there are already rules that govern it, nonetheless there are still many businessmen that cheating by selling food and drinks that have expired. The author gives advice on the role of governments and authorities in the protection of consumers must be greater control their businessman and to review again the regulations on the protection of consumers and reinforces the penalties for perpetrators usaha tersebut, so that no consumer is harmed again.

Keywords: Legal Protection, Consumer Food And Drink Expiration, Consumer Protection.
Bibliography : 25(1945-2015)